

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950 RI melaksanakan demokrasi parlementer yang lebih Liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat, dan masa ini disebut Masa demokrasi Liberal. Indonesia dibagi menjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi dan berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950. Akibat pelaksanaan konstitusi tersebut, pemerintahan RI dijalankan oleh suatu dewan menteri (kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).

Sistem politik pada masa demokrasi liberal mendorong lahirnya partai-partai politik, karena dalam sistem kepartaian menganut sistem multi partai. Konsekuensi logis dari pelaksanaan sistem politik demokrasi liberal parlementer gaya barat dengan sistem multi partai yang dianut, maka partai-partai inilah yang menjalankan pemerintahan melalui perimbangan kekuasaan dalam parlemen dalam tahun 1950-1959.

Kurun waktu antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 merupakan masa berkiprahnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR, dan dalam waktu lima tahun (1950-1955) PNI dan Masyumi silih berganti memegang kekuasaan dalam empat kabinet.

Sistem multi partai adalah salah satu varian dari beberapa sistem kepartaian yang berkembang di dunia modern saat ini. Kata kunci dari sistem multipartai tersebut adalah jumlah partai politik yang tumbuh atau eksis yang mengikuti kompetisi mendapatkan kekuasaan melalui pemilu, lebih dari dua partai politik.

Umumnya sistem ini dianggap cara paling efektif dalam merepresentasikan keinginan rakyat yang beranekaragam ras, agama, atau suku. Dan lebih cocok dengan pluralitas budaya dan politik di banding dwi partai. Sistem ini dalam pemerintahan parlementer cenderung menitikberatkan kekuasaan pada badan legislatif, hingga badan eksekutif sering berperan lemah dan ragu-ragu. Sebab tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk menduduki pemerintahan sendiri hingga memaksa untuk berkoalisi.

Selama kurun waktu 1950-1959 sering kali terjadi pergantian kabinet yang menyebabkan instabilitas politik. Parlemen mudah mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap kabinet sehingga koalisi partai yang ada di kabinet menarik diri dan kabinet pun jatuh. Sementara Sukarno selaku Presiden tidak memiliki kekuasaan secara riil kecuali menunjuk para formatur untuk membentuk kabinet-kabinet baru, suatu tugas yang sering kali melibatkan negosiasi-negosiasi yang rumit. Kabinet Koalisi yang diharapkan dapat memperkuat posisi kabinet dan dapat didukung penuh oleh partai-partai di parlemen ternyata tidak mengurangi panasnya persaingan perebutan kekuasaan antar elite politik.

Demokrasi liberal adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan yang diselenggarakan secara bebas yang mengakui hak-hak individu secara absolut. Demokrasi liberal berarti demokrasi yang dikembangkan dari sistem demokrasi yang sesungguhnya.

Istilah Demokrasi Liberal mulai muncul dan dikenal setelah Perang Dunia Ke-II yang menjadikan dunia terbelah atas kutub Barat dan Timur. Kutub timur lebih merepresentasikan komunisme, sedangkan kutub Barat diwakili oleh paham liberal dengan istilah demokrasi liberal. Demokrasi Liberal lebih menekankan pada pengakuan terhadap hak-hak warga negara, baik sebagai individu maupun masyarakat. Dan karenanya lebih bertujuan menjaga tingkat representasi warga negara dan melindunginya dari tindakan kelompok atau negara lain.

Amerika Serikat adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi liberal dengan konstitusi yang dipakai atas rakyat UU kebebasan berlandaskan republik. Amerika Serikat sering dijadikan acuan keberhasilan demokrasi liberal oleh Negara-negara barat maupun Negara dunia ketiga yang baru menata kehidupan politiknya termasuk bagi Indonesia. Demokrasi liberal cukup berhasil di Amerika Serikat dimana kebebasan individu untuk mendapat tempat yang tinggi di kehidupan politik sehingga Negara tidak berhak mengatur dan membatasi kebebasan individu yang telah dilindungi oleh konstitusi.

Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini bahkan sudah

dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945, tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Tahun 1950 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya parta-partai politik. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI & Masyumi) silih berganti memimpin kabinet. Sering bergantinya kabinet menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Multi Partai Pada Masa Demokrasi Liberal Terhadap Stabilitas Politik di Indonesia”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka penulis mengidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut.

1. Keadaan Indonesia pada demokrasi liberal .
2. Pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia.
3. Pengaruh sistem multi-partai di Indonesia.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah yang akan di teliti yaitu **“Pengaruh Sistem Multi Partai Pada Masa Demokrasi Liberal Terhadap Stabilitas Politik di Indonesia”**.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas Penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia?

2. Bagaimana pelaksanaan sistem multi partai di Indonesia pada demokrasi liberal?
3. Bagaimana pengaruh dari sistem multi partai terhadap stabilitas politik di Indonesia pada masa demokrasi liberal?

E. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan di atas antara lain sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Demokrasi Liberal di Indonesia
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem Multi Partai di Indonesia pada masa demokrasi liberal
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem Multi Partai terhadap stabilitas politik di Indonesia pada masa Demokrasi Liberal

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan adanya tujuan diatas, maka adapun manfaat yang ingin diperoleh sesudah melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan maupun pengetahuan peneliti dalam penelitian pengaruh sistem muti partai di Indonesia pada masa demokrasi liberal.
2. Untuk menambah wawasan peneliti dalam memanfaatkan penelitian tersebut sebagai sumber belajar sejarah di sekolah dengan sebaik-baiknya.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya yang akan meneliti masalah yang sama.

4. Untuk menambah bahan pembelajaran bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah Unimed.
5. Menambah wawasan kepada pembaca mengenai Demokrasi liberal dan sistem multi partai di Indonesia.



THE
Character Building
UNIVERSITY